



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
KANTOR UPBU KELAS II KOMODO



MODUL KEUANGAN TA. 2025



Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013, Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Kantor UPBU Kelas II Komodo merupakan salah satu entitas akuntansi di bawah Direktorat Jenderal Perhubungan Udara yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara berupa Laporan Keuangan. Laporan Keuangan tersebut meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan (CALK).

Penyusunan Laporan Keuangan Kantor UPBU Kelas II Komodo mengacu pada PMK Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga serta ketentuan terkait Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat. Informasi yang disajikan telah disusun sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pemangku kepentingan, khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor UPBU Kelas II Komodo. Selain itu, laporan keuangan ini juga diharapkan dapat mendukung manajemen dalam pengambilan keputusan guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Labuan Bajo, 19 Januari 2026

KEPALA KANTOR UPBU KELAS II KOMODO



CEPPY TRIONO, S.Sos., S.Si.T.

NIP. 19790331 200003 1 001

	Hal
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
Surat Pernyataan Tanggung Jawab	iv
Ringkasan	v
I. Laporan Realisasi Anggaran	1
II. Neraca	2
III. Laporan Operasional	3
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	4
V. Catatan Atas Modul Keuangan	5
Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	14
Penjelasan Atas Pos-Pos Neraca	18
Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Operasional	26
Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas	29
VI. Daftar dan Lampiran	

DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 1 : Laporan Realisasi Anggaran	1
Tabel 2 : Neraca	2
Tabel 3 : Laporan Operasional	3
Tabel 4 : Laporan Perubahan Ekuitas	4
Tabel 5 : Penggolongan Kualitas Piutang	12
Tabel 6 : Masa Manfaat	13
Tabel 7 : Rincian Estimasi Pendapatan dan Realisasi PNB	14
Tabel 8 : Perbandingan Realisasi PNB	14
Tabel 9 : Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja	15
Tabel 10 : Perbandingan Realisasi Belanja	15
Tabel 11 : Perbandingan Belanja Pegawai	16
Tabel 12 : Perbandingan Belanja Barang	17
Tabel 13 : Perbandingan Belanja Modal	17
Tabel 14 : Rincian Kas di Bendahara Penerimaan	18
Tabel 15 : Rincian Piutang Bukan Pajak	18
Tabel 16 : Rincian Mutasi Piutang	19
Tabel 17 : Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jangka Pendek	19
Tabel 18 : Rincian Persediaan	20
Tabel 19 : Rincian Mutasi Piutang	20
Tabel 20 : Rincian Aset Tetap	20
Tabel 21 : Rincian Saldo Tanah	21
Tabel 22 : Rincian Mutasi Peralatan dan Mesin	21
Tabel 23 : Rincian Mutasi Gedung dan Bangunan	22
Tabel 24 : Rincian Mutasi Jalan, Irigasi, dan Jaringan	22
Tabel 25 : Rincian Mutasi Aset Tetap Lainnya	22
Tabel 26 : Konstruksi Dalam Pengerjaan	23
Tabel 27 : Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	23
Tabel 28 : Rincian Mutasi Transaksi Terhadap Aset Tak Berwujud	24
Tabel 29 : Rincian Aset Lain-Lain	24
Tabel 30 : Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lain	25
Tabel 31 : Rincian Ekuitas	25



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA KELAS II KOMODO

JALAN : YOHANES SEHADUN
LABUAN BAJO – NTT
KODE POS 86554

Telp. : 08113824521
Fax : (0365) 41141

Email : komodo.apo@gmail.com

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Kantor UPBU Kelas II Komodo yang terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025 (*Unaudited*) sebagaimana terlampir merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, serta telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara wajar sesuai dengan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Labuan Bajo, 19 Januari 2026

KEPALA KANTOR UPBU KELAS II KOMODO



CEPPY TRIONO, S.Sos., S.Si.T.

NIP. 19790331 200003 1 001

RINGKASAN

Berdasarkan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan ketentuan terkait Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP). Laporan Keuangan tersebut meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan Keuangan Kantor UPBU Kelas II Komodo Tahun Anggaran 2025 telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan dan belanja selama periode 01 Januari sampai dengan 31 Desember 2025. Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran TA 2025 dapat disajikan sebagai berikut :

- Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah pada TA. 2025 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp. 26.589.933.409,- atau mencapai 158,50 persen dari Estimasi Pendapatan sebesar Rp. 16.776.388.000,-.
- Realisasi Belanja Negara pada TA. 2025 adalah sebesar Rp. 42.539.478.917,- atau mencapai 85,87 persen dari Alokasi Pagu Anggaran sebesar Rp. 49.542.135.000,-.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada 31 Desember 2025.

Jumlah Aset adalah sebesar Rp. 3.930.527.924.149,- yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp. 156.086.308,- Aset Tetap sebesar Rp. 3.927.417.772.048,- Piutang Jangka Panjang Rp. 0,- dan Aset Lainnya sebesar Rp. 2.954.065.793,-. Jumlah Kewajiban adalah sebesar Rp.0,-. Sementara itu jumlah Ekuitas adalah sebesar Rp. 3.930.527.924.149,-.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan nonoperasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode Januari sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp.

26.604.933.168,- sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp. 73.634.356.261,- sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp. (47.029.423.093,-). Kegiatan Non Operasional surplus sebesar Rp. 20.653.000,- dan Pos-Pos Luar Biasa Rp.0,- sehingga Entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp. (47.008.770.093,-).

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2025 adalah sebesar Rp. 3.974.994.523.793,- dikurangi Defisit-LO sebesar Rp. (47.008.770.093,-) kemudian ditambah dengan Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi sebesar Rp. (13.407.375.059,-) Selisih Revaluasi Aset Tetap sebesar Rp. 0,- dan ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp. 15.949.545.508,- sehingga Ekuitas Entitas pada tanggal 31 Desember 2025 adalah senilai Rp. 3.930.527.924.149,-

5. CATATAN ATAS MODUL KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CALK) menyajikan informasi berupa penjelasan, rincian, atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Selain itu, CALK juga menyajikan informasi yang diwajibkan dan dianjurkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, serta pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian laporan keuangan secara wajar.

Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun Anggaran 2025 disusun dan disajikan berdasarkan basis akrual.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun 2025 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Tabel.1
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025
KANTOR UPBU KELAS II KOMODO

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31-Dec-25			31-Dec-24
		ANGGARAN	REALISASI	% REALISASI TERHADAP ANGGARAN	REALISASI
PENDAPATAN					
1. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	16.776.388.000	26.589.933.409	158,50	21.287.661.990
2. Pendapatan Hibah	B.1	0	0	0	0
Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah		16.776.388.000	26.589.933.409	158,50	21.287.661.990
BELANJA	B.2				
1. Belanja Pegawai	B.2.1	11.486.518.000	11.297.950.265	98,36	5.440.282.399
2. Belanja Barang	B.2.2	30.612.017.000	23.812.856.652	77,79	25.693.173.201
3. Belanja Modal	B.2.3	7.443.600.000	7.428.672.000	99,80	52.423.486.000
Jumlah Belanja		49.542.135.000	42.539.478.917	85,87	83.556.941.600

II. NERACA

Tabel.2
PERBANDINGAN NERACA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025
KANTOR UPBU KELAS II KOMODO

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31-Dec-25	31-Dec-24
ASET			
Aset Lancar			
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	C.1	0	13.490.000.000
Piutang Bukan Pajak	C.2	118.277.700	0
Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Bukan Pajak	C.3	(591.392)	0
PIUTANG BUKAN PAJAK (NETTO)	C.4	117.686.308	0
Persediaan		38.400.000	11.380.000
Jumlah Aset Lancar		156.086.308	13.501.380.000
Aset Tetap			
Tanah	C.5		
Peralatan dan Mesin	C.6	3.517.708.069.261	3.517.708.069.261
Gedung dan Bangunan	C.7	138.215.119.175	155.359.624.765
Jalan Irigasi dan Jaringan	C.8	272.279.375.984	275.183.523.984
Aset Tetap Lainnya	C.9	437.457.360.321	437.752.222.321
KDP	C.10	0	846.200.000
Akumulasi Penyusutan	C.11	-	-
Jumlah Aset Tetap	C.12	(438.242.152.693)	(425.358.322.755)
		3.927.417.772.048	3.961.491.317.576
Aset Lainnya			
Aset Tak Berwujud	C.13	0	14.609.744
Aset Lain-Lain	C.14	29.194.803.834	456.969.500
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi	C.15	(26.240.738.041)	(469.753.027)
Jumlah Aset Lainnya		2.954.065.793	1.826.217
JUMLAH ASET		3.930.527.924.149	3.974.994.523.793
EKUITAS			
Ekuitas	C.16	3.930.527.924.149	3.974.994.523.793
JUMLAH EKUITAS		3.930.527.924.149	3.974.994.523.793
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		3.930.527.924.149	3.974.994.523.793

III. LAPORAN OPERASIONAL

Tabel.3
PERBANDINGAN LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025
KANTOR UPBU KELAS II KOMODO

(Dalam Rupiah)			
URAIAN	CATATAN	31-Dec-25	31-Dec-24
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	26.604.933.168	20.646.726.998
JUMLAH PENDAPATAN		26.604.933.168	20.646.726.998
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	11.297.950.265	5.440.282.399
Beban Persediaan	D.3	865.869.200	240.032.000
Beban Barang dan Jasa	D.4	15.506.172.776	19.021.001.447
Beban Pemeliharaan	D.5	7.413.794.676	5.737.185.534
Beban Perjalanan Dinas	D.6	0	736.074.220
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	D.7	0	0
Beban Bantuan Sosial	D.8	0	0
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.9	38.549.977.952	39.391.629.565
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.10	591.392	0
Beban Lain-lain	D.11	0	0
JUMLAH BEBAN		73.634.356.261	70.566.205.165
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(47.029.423.093)	(49.919.478.167)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	D.12	0	0
Surplus/(Defisit) Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		20.653.000	640.934.992
Pendapatan Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		20.653.000	640.934.992
Beban Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		0	0
JUMLAH SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		20.653.000	640.934.992
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		(47.008.770.093)	(49.278.543.175)
POS LUAR BIASA			
POS LUAR BIASA		0	0
Beban Luar Biasa		0	0
POS LUAR BIASA	D.13	0	0
SURPLUS/DEFISIT-LO		(47.008.770.093)	(49.278.543.175)

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Tabel.4
PERBANDINGAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025
KANTOR UPBU KELAS II KOMODO

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31-Dec-25	31-Dec-24
EKUITAS AWAL	E.1	3.974.994.523.793	3.970.525.371.748
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(47.008.770.093)	(49.278.543.175)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI			-
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS		(13.407.375.059)	(12.479.314.692)
Penyesuaian Nilai Aset		0	0
Koreksi Nilai Persediaan	E.3	0	0
Selisih Revaluasi Aset Tetap	E.4	0	0
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	E.5	(13.407.375.059)	(12.479.314.692)
Lain-lain	E.6	0	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.7	15.949.545.508	66.227.009.912
KENAIKAN/PENURUNAN ENTITAS		(44.466.599.644)	(4.469.152.045)
EKUITAS AKHIR	E.8	3.930.527.924.149	3.974.994.523.793

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

Dasar Hukum

I. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.
7. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-80/PB/2011 Penambahan dan Perubahan Akun Pendapatan, Belanja, dan Transfer pada Bagan Akun Standar.
8. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-42/PB/2012 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Non Anggaran dan Neraca pada Bagan Akun Standar.
9. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-55/PB/ 2012 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.

II. KEBIJAKAN TEKNIS KANTOR UPBU KOMODO

Rencana Strategis

Kantor UPBU Kelas II Komodo didirikan sebagai salah satu upaya Pemerintah dalam memberikan pelayanan jasa transportasi udara kepada masyarakat, khususnya di wilayah Nusa Tenggara Timur.

Kantor UPBU Kelas II Komodo bertujuan untuk menyelenggarakan pelayanan jasa transportasi udara yang tertib, teratur, tepat waktu, aman, bersih, dan nyaman, serta memberikan kemudahan aksesibilitas dan mendukung pengembangan pariwisata di

Labuan Bajo.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kantor UPBU Kelas II Komodo memiliki peran strategis dalam mendukung konektivitas wilayah, peningkatan pelayanan publik, serta pertumbuhan ekonomi daerah melalui sektor transportasi udara. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, Kantor UPBU Kelas II Komodo memerlukan dukungan pendanaan yang memadai guna menunjang kegiatan operasional bandar udara, pemeliharaan sarana dan prasarana, serta peningkatan kualitas pelayanan.

Pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran tersebut disajikan dalam Laporan Keuangan Kantor UPBU Kelas II Komodo yang disusun secara efisien, efektif, akuntabel, dan transparan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

III. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

*Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan*

Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025 merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh entitas akuntansi Kantor UPBU Kelas II Komodo. Laporan Keuangan ini disusun melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI), yaitu serangkaian prosedur yang meliputi proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, hingga pelaporan posisi keuangan dan kinerja keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

Sejalan dengan perkembangan sistem pengelolaan keuangan negara, proses penyusunan laporan keuangan saat ini telah terintegrasi melalui aplikasi SAKTI yang mengintegrasikan fungsi perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan keuangan dalam satu sistem terpadu. Melalui sistem tersebut, penyusunan Laporan Keuangan mencakup Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Selain itu, pengelolaan dan pelaporan Barang Milik Negara (BMN) dilaksanakan melalui modul pengelolaan aset dalam sistem yang terintegrasi, sehingga informasi terkait aset tetap, persediaan, dan BMN lainnya dapat disajikan secara akurat dan mendukung penyusunan laporan keuangan serta laporan manajerial lainnya.

IV. KEBIJAKAN AKUNTANSI

*Kebijakan
Akuntansi*

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025 pada Kantor UPBU Kelas II Komodo telah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71

Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Selain itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan negara yang tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Kebijakan akuntansi yang signifikan yang diterapkan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor UPBU Kelas II Komodo adalah sebagai berikut:

1) Pendapatan-LRA

*Pendapatan
-LRA*

- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

2) Pendapatan-LO

*Pendapatan
-LO*

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

3) Belanja

Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran KUN yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah pusat. Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.

- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan pada lembar muka laporan keuangan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja.

4) **Beban**

Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

5) **Aset**

Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut, dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah.

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar ini terdiri dari kas, piutang, dan persediaan.

Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI

pada tanggal neraca.

Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihannya.

Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai bagian lancar TPA/TGR.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan dicatat di neraca berdasarkan harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian, harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri, dan harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi.

b. Aset Tetap

Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun. Aset tetap dilaporkan pada neraca Satker per 30 Juni berdasarkan harga perolehan.

Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:

- Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah), dan
- Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah).

Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

*Piutang
Jangka
Panjang*

6) Piutang Jangka Panjang

Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Termasuk dalam

Piutang Jangka Panjang adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun, dan Piutang Jangka Panjang Lainnya.

TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.

- TP ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian Negara/daerah. TGR merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri atau bukan pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya. TPA dan TGR yang akan jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai aset lainnya.
- TP ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian Negara/daerah. TGR merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri atau bukan pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya. TPA dan TGR yang akan jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai aset lainnya.

7) Aset Lainnya

Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Tagihan Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain.

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak

*Aset
Lainnya*

mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Aset Tak Berwujud meliputi software komputer; lisensi dan franchise; hak cipta (copyright), paten, goodwill, dan hak lainnya, hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang.

Aset Lain-lain merupakan aset lainnya yang tidak dapat dikategorikan ke Kemitraan dengan Pihak Ketiga, maupun Dana yang Dibatasi, Penggunaannya. Aset lain-lain dapat berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah.

8) Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintahan lain, atau lembaga internasional. Kewajiban pemerintah juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah. Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan.

Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, Utang Bunga (*accrued interest*) dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Kewajiban

Aliran ekonomi sesudahnya seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian karena perubahan kurs mata uang asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut.

9) Ekuitas Dana

*Ekuitas
Dana*

Ekuitas dana merupakan kekayaan bersih pemerintah, yaitu selisih antara aset dan *kewajiban* pemerintah. Ekuitas dana diklasifikasikan Ekuitas Dana Lancar dan Ekuitas Dana Investasi. Ekuitas Dana Lancar merupakan selisih antara aset lancar dan *kewajiban* jangka pendek. Ekuitas Dana Investasi mencerminkan selisih antara aset tidak lancar dan kewajiban jangka panjang.

10) Kebijakan Akuntansi atas Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo dan perkembangan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Kualitas piutang didasarkan pada kondisi masing-masing piutang pada tanggal pelaporan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.06/20110 tentang Kualitas Piutang Kementerian Negara/Lembaga dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih.

*Tabel. 5
Penggolongan Kualitas Piutang*

*Penyisihan
Piutang*

Kualitas Piutang	Uraian		Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo		0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan		10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan		50%
Macet	1.	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2.	Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

11) Kebijakan Akuntansi atas Penyusutan Aset Tetap

Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada peraturan Menteri Keuangan No. 01/PMK.06/2013 tentang penyusutan barang milik Negara berupa aset tetap pada entitas pemerintah pusat.

Penyusutan aset tidak dilakukan terhadap :

1. Tanah
2. Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)
3. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada pengelola barang untuk dilakukan penghapusan

Nilai yang disusutkan pertama kali adalah nilai yang tercatat dalam pembukuan per 30 Juni 2013 untuk aset tetap yang diperoleh sampai dengan tanggal tersebut. Sedangkan untuk aset tetap yang diperoleh setelah 30 Juni 2013, nilai yang disusutkan didasarkan pada nilai perolehan.

Perhitungan dan pencatatan penyusutan aset tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan nilai residu. Penyusutan aset tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus, yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan secara merata selama masa manfaat aset tetap.

Penetapan masa manfaat aset tetap mengacu pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat dalam rangka penyusutan Barang Milik Negara berupa aset tetap pada entitas pemerintah pusat.

Secara umum, masa manfaat aset tetap disajikan sebagai berikut:

Tabel. 6
Masa Manfaat

KELOMPOK ASET TETAP	MASA MANFAAT
Peralatan dan Mesin	2 s.d 20 Tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d 50 Tahun
Jalan, Irigasi dan Jaringan	2 s.d 40 Tahun
Aset Tetap Lainnya	4 Tahun

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

B.1 Pendapatan Negara dan Hibah

*Realisasi Pendapatan
Negara dan Hibah
31 Desember 2025
Rp. 26.589.933.409,-
31 Desember 2024
Rp. 21.287.661.990,-*

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah pada TA. 2025 adalah sebesar Rp. 26.589.933.409,- atau mencapai 158,50 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp. 16.776.388.000,-. Keseluruhan Pendapatan Negara dan Hibah Kantor UPBU Komodo adalah merupakan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP). Rincian Estimasi Pendapatan dan realisasi PNBP lainnya per tanggal pelaporan dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

*Tabel 7
Rincian Estimasi Pendapatan dan realisasi PNBP*

No.	Uraian	Estimasi Pendapatann	Realisasi	%
1.	Pendapatan dari Pengelolaan BMN	-	-	-
2.	Pendapatan Jasa	16.776.388.000	26.589.933.409	158,50
3.	Pendapatan Jasa Lainnya	-	-	-
4.	Pendapatan Denda Keterlambatan	-	-	-
5.	Pendapatan Lain-Lain	-	-	-
	Jumlah	16.776.388.000	26.589.933.409	158,50

Realisasi PNBP Tahun Anggaran 2025 mengalami peningkatan yang signifikan dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2024. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh bertambahnya frekuensi penerbangan di Bandar Udara Komodo yang berdampak pada peningkatan pendapatan jasa kebandarudaraan, serta meningkatnya pemanfaatan aset melalui kegiatan sewa di area terminal bandara. Selain itu, peningkatan aktivitas operasional dan kunjungan penumpang juga turut memberikan kontribusi terhadap optimalisasi penerimaan PNBP.

*Tabel 8
Perbandingan Realisasi PNBP TA. 2025 dan 2024*

No.	Uraian	TA. 2025 (Rp)	TA. 2024 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	
				(Rp)	%
1.	Pendapatan Sumber Daya Alam	-	-	-	-
2.	Pendapatan PNBP Lainnya	26.589.933.409	21.287.661.990	5.302.271.419	24,91
3.	Pendapatan Kekayaan Negara	-	-	-	-

Realisasi Belanja Negara
31 Desember 2025
Rp. 42.539.478.917,-
31 Desember 2024
Rp. 83.556.941.600,-

4.	Pendapatan BLU	-	-	-	-
	Jumlah	26.589.933.409	21.287.661.990	5.302.271.419	24,91

B.2. Belanja Negara

Realisasi belanja Kantor UPBU Komodo pada TA. 2025 adalah sebesar Rp. 42.539.478.917,- atau sebesar 85,87 persen dari anggarannya Rp. 49.542.135.000,-. Anggaran dan realisasi belanja TA. 2025 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 9
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja

Kode Jenis Belanja	Uraian Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi Belanja	%
51	Belanja Pegawai	11.486.518.000	11.297.950.265	98,36%
52	Belanja Barang	30.612.017.000	23.812.856.652	77,79%
53	Belanja Modal	7.443.600.000	7.428.672.000	99,80%
	Jumlah	49.542.135.000	42.539.478.917	85,87%

Realisasi belanja Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar Rp41.017.462.683 dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2024. Penurunan tersebut disebabkan oleh berkurangnya pagu anggaran pada Tahun Anggaran 2025 sebagai dampak dari kebijakan efisiensi anggaran.

Selain itu, pada Tahun Anggaran 2025 tidak terdapat kegiatan belanja modal berupa pembangunan fisik, sehingga turut berkontribusi terhadap penurunan realisasi belanja secara keseluruhan. Perbandingan realisasi belanja TA. 2025 dan 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 10
Perbandingan Realisasi Belanja TA 2025 dan 2024

Kode Jenis Belanja	Uraian Jenis Belanja	Realisasi Belanja (Rp)		Naik/ (Turun)	
		31-Dec-25	31-Dec-24	(Rp)	(%)
51	Belanja Pegawai	11.297.950.265	5.440.282.399	5.857.667.866	107,67
52	Belanja Barang	23.812.856.652	25.693.173.201	-1.880.316.549	-7,32
53	Belanja Modal	7.428.672.000	52.423.486.000	7.428.672.000	-85,83
	Jumlah	42.539.478.917	83.556.941.600	-41.017.462.683	-49,09

Belanja Pegawai
31 Desember 2025
Rp.11.297.950.265,-
31 Desember 2024
Rp. 5.440.282.399,-

B.2.1 Belanja Pegawai

Realisasi belanja pegawai TA. 2025 dan TA. 2024 adalah masing-masing sebesar Rp. 11.297.950.265,- dan Rp. 5.440.282.399,- dan mengalami kenaikan sebesar Rp. 5.857.667.866,-. Realisasi belanja pegawai pada Tahun Anggaran 2025 mengalami peningkatan sebesar 107,67 persen dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2024.

Peningkatan tersebut antara lain disebabkan oleh adanya perubahan status pegawai dari Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), yang berdampak pada peningkatan komponen belanja pegawai. Rincian belanja pegawai disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 11
Perbandingan Belanja Pegawai 2025 dan 2024

Uraian	31-Dec-25	31-Dec-24	Naik / (Turun)	(%)
Belanja Gaji Pokok PNS	2.065.016.420	1.779.353.720	285.662.700	16,05
Belanja Pembulatan Gaji PNS	36.852	32.969	3.883	11,78
Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	73.451.260	80.553.880	-7.102.620	-8,82
Belanja Tunj. Anak PNS	17.861.064	17.032.848	828.216	4,86
Belanja Tunj. Struktural PNS	30.140.000	33.810.000	-3.670.000	-10,85
Belanja Tunj. Fungsional PNS	28.730.000	18.510.000	10.220.000	55,21
Belanja Tunj. PPh PNS	6.776.508	7.875.129	-1.098.621	-13,95
Belanja Tunj. Beras PNS	87.555.780	80.024.100	7.531.680	9,41
Belanja Uang Makan PNS	449.684.000	355.311.000	94.373.000	26,56
Belanja Tunj. Umum PNS	105.450.000	88.870.000	16.580.000	18,66
Belanja Gaji Pokok PPPK	1.894.466.900	34.305.600	1.860.161.300	5422,33
Belanja Pembulatan Gaji PPPK	34.661	568	34.093	6002,29
Belanja Tunj. Suami/Istri PPPK	133.955.160	0	133.955.160	100,00
Belanja Tunj. Anak PPPK	42.837.676	0	42.837.676	100,00
Biaya Tunjangan Fungsional PPPK	3.640.000	3.120.000	520.000	16,67
Biaya Tunjangan Beras PPPK	142.232.880	796.620	141.436.260	17754,55
Belanja Uang Makan PPPK	487.127.000	7.770.000	479.357.000	6169,33
Belanja Tunjangan Kompensasi Kerja PPPK	31.662.135	43.116.959	-11.454.824	-26,57
Belanja Tunj. Umum PPPK	121.985.000	0	121.985.000	100,00
Belanja Uang Lembur	298.301.000	296.558.000	1.743.000	0,59
Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan/Kinerja)	3.320.593.133	2.593.242.196	727.350.937	28,05
Belanja Pegawai Tunjangan khusus/kegiatan/kinerja PPPK	1.956.412.836	0	1.956.412.836	100,00
Realisasi Belanja Bruto	11.297.950.265	5.440.283.589	5.857.666.676	107,67
<i>Pengembalian Belanja</i>	0	1.190	0	0
Realisasi Belanja Netto	11.297.950.265	5.440.282.399	5.857.667.866	107,67

B.2.2 Belanja Barang

Belanja Barang
31 Desember 2025
Rp.23.812.856.652,-
31 Desember 2024
Rp.25.693.173.201
,-

Realisasi Belanja Barang TA. 2025 dan TA. 2024 adalah masing-masing sebesar Rp. 23.812.856.652,- dan Rp. 25.693.173.201,- dan mengalami penurunan Rp. 1.880.316.549,-. Penurunan realisasi belanja barang sebesar 7,32 persen. Penurunan tersebut antara lain disebabkan oleh berkurangnya alokasi anggaran pada belanja barang operasional serta belanja pemeliharaan pada Tahun Anggaran 2025.

Rincian Belanja Barang disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 12
Perbandingan Belanja Barang TA. 2025 dan TA. 2024

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Naik/ (Turun)	
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
Belanja Persediaan	892.889.200	198.912.000	693.977.200	348,89
Belanja Barang dan Jasa	15.506.172.776	19.021.001.447	-3.514.828.671	-18,48
Belanja Pemeliharaan	7.413.794.676	5.737.185.534	1.676.609.142	29,22
Belanja Perjalanan Dinas	0	736.074.220	-736.074.220	-100,00
Belanja Barang Non Operasional	0	0	0	0,00
Realisasi Belanja Bruto	23.812.856.652	25.693.173.201	-1.880.316.549	-7,32
<i>Pengembalian Belanja</i>	0	0	0	0,00
Realisasi Belanja Bruto	23.812.856.652	25.693.173.201	-1.880.316.549	-7,32

B.2.3 Belanja Modal

Belanja Modal
31 Desember 2025
Rp. 7.428.672.000
31 Desember 2024
Rp.
52.423.486.000,-

Realisasi Belanja Modal TA. 2025 dan TA. 2024 adalah masing-masing sebesar Rp. 7.428.672.000,- dan Rp. 52.423.486.000,-. Rincian Belanja Modal TA. 2025 dan TA. 2024 disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 13
Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2025 dan 2024

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Naik/ (Turun)	
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
Belanja Modal Tanah	0	0	0	0,00
Belanja Modal Peralatan & Mesin	7.428.672.000	15.923.486.000	-8.494.814.000	-53,35
Belanja Modal Gedung & Bangunan	0	0	0	0,00
Belanja Modal Jalan, Irigasi & Jaringan	0	36.500.000.000	-36.500.000.000	-100,00
Belanja Modal Fisik lainnya	0	0	0	0,00
Realisasi Belanja Bruto	7.428.672.000	52.423.486.000	-44.994.814.000	-85,83
<i>Pengembalian Belanja</i>	0	0	0	0,00
Realisasi Belanja Bruto	7.428.672.000	52.423.486.000	-44.994.814.000	-85,83

C. PENJELASAN ATAS POS- POS NERACA

C.1 Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)

*Belanja Dibayar
Dimuka (prepaid)
31 Desember 2025
Rp. 0,-
31 Desember 2024
Rp.
13.490.000.000,-*

Belanja Dibayar Dimuka (prepaid) per tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp. 0,- dan Rp. 13.490.000.000,-. Beban Dibayar di Muka merupakan pembayaran atas barang dan/atau jasa yang telah dilakukan sebelum barang dan/atau jasa tersebut diterima atau dimanfaatkan seluruhnya pada tanggal neraca. Dengan demikian, Beban Dibayar di Muka merupakan aset yang mencerminkan hak entitas untuk memperoleh manfaat ekonomi di masa mendatang.

Nilai Belanja Dibayar Dimuka (prepaid) per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

*Tabel. 14
Rincian Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)*

No	Jenis	31-Dec-25	31-Dec-24
1	Kendaraan PKP-PK ARFF Foam Tender Tipe II	Rp -	Rp 13.490.000.000
Jumlah		Rp -	Rp 13.490.000.000

C.2 Piutang Bukan Pajak

Piutang Bukan Pajak per tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp. 118.277.700,- dan Rp. 0,-.

Piutang Bukan Pajak merupakan hak pemerintah atas penerimaan yang berasal dari pelayanan yang telah diberikan, namun sampai dengan tanggal neraca belum diterima pembayarannya. Piutang tersebut diakui sebagai aset yang mencerminkan klaim pemerintah kepada pihak lain dan akan diselesaikan melalui penerimaan kas di masa mendatang.

Nilai Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Piutang Bukan Pajak
31 Desember 2025
Rp. 118.277.700,-
31 Desember 2024
Rp. 0,-

Tabel. 15
Rincian Piutang Bukan Pajak

No.	Debitur	Jumlah
1	PT. Super Air Jet	Rp 12.025.000
2	PT. Batik Air	Rp 60.312.500
3	PT. Wings Air	Rp 11.525.000
4	PT. Air Asia Berhad	Rp 25.165.200
5	PT. Indonesia Air Asia	Rp 8.950.000
6	PT. Susi Air	Rp 300.000
	Jumlah	Rp 118.277.700

Sedangkan mutasi piutang per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel. 16
Rincian Mutasi Piutang

Saldo per 31 Desember 2024	Rp -
Mutasi tambah:	
Piutang Sewa	Rp 118.277.700
Mutasi kurang:	
Pelunasan	Rp -
Saldo per 31 Desember 2025	Rp 118.277.700

C.3 Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Bukan Pajak

Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Bukan Pajak
31 Desember 2025
Rp. (591.392),-
31 Desember 2024
Rp. 0,-

Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jangka Pendek 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp. (591.392),- dan Rp. 0,-.

Berikut disajikan perhitungan penyisihan piutang tak tertagih jangka pendek untuk masing-masing debitur :

Tabel. 17
Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jangka Pendek

No	Debitur	Kualitas	Nilai Piutang	Penyisihan	Nilai Penyisihan
1	PT. Super Air Jet	Lancar	Rp 12.025.000	0.5%	60.125
2	PT. Batik Air	Lancar	Rp 60.312.500	0.5%	301.563
3	PT. Wings Air	Lancar	Rp 11.525.000	0.5%	57.625
4	PT. Air Asia Berhad	Lancar	Rp 25.165.200	0.5%	125.826
5	PT. Indonesia Air Asia	Lancar	Rp 8.950.000	0.5%	44.750
6	PT. Susi Air	Lancar	Rp 300.000	0.5%	1.500
	Total				Rp 591.392

C.4 Persediaan

Persediaan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp. 38.400.000,- dan Rp. 11.380.000,-. Persediaan merupakan aset dalam

Persediaan
31 Desember 2024
Rp. 38.400.000,-
31 Desember 2024
Rp. 11.380.000,-

bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional, untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Seluruh persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik dan siap digunakan untuk mendukung kegiatan operasional. Rincian Persediaan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel. 18

Rincian Persediaan

Uraian	31-Dec-25	31-Dec-24
Barang Konsumsi	Rp 38.400.000	Rp 11.380.000
Barang Untuk Pemeliharaan	Rp -	Rp -
Suku Cadang	Rp -	Rp -
Bahan Baku	Rp -	Rp -
Persediaan Lainnya	Rp -	Rp -
Jumlah	Rp 38.400.000	Rp 11.380.000

Mutasi persediaan pada 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel. 19

Rincian Mutasi Persediaan

Saldo per 31 Desember 2025	Rp 38.400.000
Mutasi tambah:	
- Pembelian	Rp 892.889.200
Mutasi kurang:	
- Habis pakai	Rp 865.869.200
Saldo per 31 Desember 2024	Rp 11.380.000

C.5 Aset Tetap

Aset Tetap
31 Desember 2025
Rp.
3.927.417.772.048,-
31 Desember 2024
Rp.
3.961.491.317.576,-

Saldo aset Tetap per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp. 3.927.417.772.048,- dan Rp. 3.961.491.317.576,- yang merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas. Rincian Aset Tetap Kantor UPBU Kelas II Komodo Per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel. 20

Rincian Aset Tetap

No.	Uraian	31-Dec-25	31-Dec-24
1	Tanah	Rp 3.517.708.069.261	Rp 3.517.708.069.261
2	Peralatan dan Mesin	Rp 138.215.119.175	Rp 155.359.624.765
3	Gedung dan Bangunan	Rp 272.279.375.984	Rp 275.183.523.984
4	Jalan Irigasi dan Jaringan	Rp 437.457.360.321	Rp 437.752.222.321
5	Aset Tetap Lainnya	Rp -	Rp 846.200.000
6	KDP	Rp -	Rp -
7	Akumulasi Penyusutan	Rp (438.242.152.693)	Rp (425.358.322.755)
	Jumlah	Rp 3.927.417.772.048	Rp 3.961.491.317.576

C.6 Tanah

Tanah
31 Desember 2025
Rp.
3.517.708.069.261,-
31 Desember 2024
Rp.
3.517.708.069.261,-

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Kantor UPBU Kelas II Komodo per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp. 3.517.708.069.261,- dan Rp. 3.517.708.069.261,-. Tidak ada perubahan nilai aset tanah. Rincian saldo tanah per 31 Desember 2025 terdiri dari:

Tabel. 21

Rincian Saldo Tanah

No.	KIB	Luas	Nilai	Keterangan
1	1	952.000	Rp 3.303.621.953.258	Bersertifikat
2	2	9.325	Rp 63.668.861.003	Bersertifikat
3	4	156.141	Rp 150.417.255.000	Proses Sertifikat
	Total	961.325	Rp 3.517.708.069.261	

Tanah seluas 961.325 m² merupakan tanah lapangan terbang komersial dan terminal bandara untuk operasional Kantor UPBU Kelas II Komodo.

C.7 Peralatan dan Mesin

Peralatan dan
Mesin
31 Desember 2025
Rp.
138.215.119.175,-
31 Desember 2024
Rp.
155.359.624.765,-

Saldo aset tetap berupa peralatan dan mesin per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah Rp. 138.215.119.175,- dan Rp. 155.359.624.765,-

Tabel. 22

Mutasi Nilai Peralatan dan Mesin

Saldo per 01 Januari 2025	Rp 155.363.846.375
Mutasi tambah:	Rp 7.428.672.000
- Pembelian	Rp 7.428.672.000
- Penyelesaian Pembangunan	Rp -
- Transfer Masuk	Rp -
- Reklasifikasi Masuk	Rp -
Mutasi kurang:	Rp 24.577.399.200
- Reklasifikasi Keluar	Rp 24.577.399.200
Saldo per 31 Desember 2025	Rp 138.215.119.175

Gedung dan Bangunan
31 Desember 2025
Rp.
272.279.375.984,-
31 Desember 2024
Rp.
275.183.523.984,-

C.8 Gedung dan Bangunan

Nilai gedung dan bangunan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah Rp. 272.279.375.984,- dan Rp. 275.183.523.984,-. Realisasi belanja dalam rangka perolehan Aset Gedung dan Bangunan pada Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp. 0,-.

Tabel. 23

Mutasi Gedung dan Bangunan

Saldo per 31 Desember 2024	Rp	275.183.523.984
Mutasi tambah:	<i>Rp</i>	-
- Penyelesaian Pembangunan	Rp	-
- Pengembangan Nilai Aset	Rp	-
- Koreksi Nilai Tim Penerbitan Aset	Rp	-
Mutasi kurang:	<i>Rp</i>	2.904.148.000
- Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas	Rp	2.904.148.000
- Koreksi Semu Hasil Penilaian Kembali	Rp	-
Saldo per 31 Desember 2025	Rp	272.279.375.984

Jalan, Irigasi dan Jaringan
31 Desember 2025
Rp.
437.457.360.321
31 Desember 2024
Rp.
437.752.222.321,-

C.9 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp. 437.457.360.321,- dan Rp. 437.752.222.321,-.

Tabel. 24

Mutasi Jalan, Irigasi dan Jaringan

Saldo per 31 Desember 2024	Rp	437.752.222.321
Mutasi tambah:	<i>Rp</i>	-
- Penyelesaian Pembangunan	Rp	-
- Koreksi Nilai Tim Penertiban Aset	Rp	-
Mutasi kurang:	<i>Rp</i>	294.862.000
- Koreksi Semu Hasil Penilaian Kembali	Rp	294.862.000
Saldo per 31 Desember 2025	Rp	437.457.360.321

Aset Tetap Lainnya
31 Desember 2025
Rp. 0,-
31 Desember 2024
Rp. 846.200.000,-

C.10 Aset Tetap Lainnya

Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah Rp.0,- dan Rp. 846.200.000,- yang merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan.

Tabel. 25
Mutasi Aset Tetap Lainnya

Saldo per 31 Desember 2024	Rp	846.200.000
Mutasi tambah:		
- Penyelesaian Pembangunan	Rp	-
- Transfer Masuk	Rp	-
- Pengembangan	Rp	-
Mutasi kurang:	Rp	846.200.000
- Koreksi Pencatatan Nilai	Rp	846.200.000
Saldo per 31 Desember 2025	Rp	-

C.11 Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Saldo konstruksi dalam pengerjaan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-.

Konstruksi Dalam
Pengerjaan
31 Desember 2025
Rp.0,-
31 Desember 2024
Rp. 0,-

Tabel. 26
Konstruksi Dalam Pengerjaan pada TA 2025

Saldo per 31 Desember 2024	Rp	-
Mutasi tambah:	<i>Rp</i>	-
- Konstruksi Dalam Pengerjaan	Rp	-
Mutasi kurang:	<i>Rp</i>	-
- Penyelesaian Pembangunan	Rp	-
- Pengembangan	Rp	-
Saldo per 31 Desember 2025	Rp	-

C.12 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing Rp. (438.242.152.693,-) dan Rp. (425.358.322.755,-). Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP).

Penyusutan Aset
Tetap
31 Desember 2025
Rp.
(438.242.152.693,-)
31 Desember 2024
Rp.
(425.358.322.755,-)

Tabel 27
Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap TA 2025

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	Rp 138.215.119.175	Rp (110.975.705.993)	Rp 27.239.413.182
2	Gedung dan Bangunan	Rp 272.279.375.984	Rp (46.739.157.993)	Rp 225.540.217.991
3	Jalan dan Jembatan, Irigasi dan Jaringan	Rp 437.457.360.321	Rp (280.527.288.707)	Rp 156.930.071.614
4	Aset Tetap Lainnya	Rp -	Rp -	Rp -
Akumulasi Penyusutan		Rp 847.951.855.480	Rp (438.242.152.693)	Rp 409.709.702.787

Aset Tak Berwujud
31 Desember 2025
Rp.0,-
31 Desember 2024
Rp. 14.609.744,-,-

C.13 Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah Rp. 0,- dan Rp. 14.609.744,-. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Mutasi transaksi terhadap Aset Tak Berwujud pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Tabel. 28
Mutasi transaksi terhadap Aset Tak Berwujud

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2024	Rp 14.609.744
Mutasi tambah:	Rp -
Mutasi kurang:	Rp 14.609.744
Saldo per 31 Desember 2025	Rp -

Aset Lain-Lain
31 Desember 2025
Rp.29.194.803.834,-
31 Desember 2024
Rp. 456.969.500,-

C.14 Aset Lain-Lain

Saldo Aset Lain-Lain per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah Rp. 29.194.803.834,- dan Rp. 456.969.500,-. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas. Adapun mutasi aset lain-lain adalah sebagai berikut :

Tabel. 29
Aset Lain-Lain pada Tahun Anggaran 2025

Saldo per 31 Desember 2024	Rp 456.969.500
Mutasi tambah:	
- Reklasifikasi Dari Aset Tetap	Rp 28.737.834.334
Mutasi kurang:	
- Penggunaan Kembali BMN Yang Dihentikan	Rp -
- Penghapusan BMN	Rp -
Saldo per 31 Desember 2025	Rp 29.194.803.834

*Akumulasi
Penyusutan dan
Amortisasi Aset
Lainnya
31 Desember 2024
Rp.
(26.240.738.041,-)
31 Desember 2023
Rp. (469.753.027,-)*

C. 15 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing Rp.(26.240.738.041,-) dan Rp.(469.753.027,-) Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel. 30
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi TA 2025

Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi	Nilai Buku
Aset Tak Berwujud	Rp -	Rp -	Rp -
Aset Lain-lain	Rp 29.194.803.834	Rp 26.240.738.041	Rp 2.954.065.793
Jumlah			Rp 2.954.065.793

C.16 Ekuitas

*Ekuitas
31 Desember 2025
Rp.
3.930.527.924.149,-
dan
31 Desember 2024
Rp.
3.974.994.523.793,-*

Ekuitas per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp. 3.930.527.924.149,- dan Rp. 3.974.994.523.793,- Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas :

Tabel. 31
Ekuitas Tahun Anggaran 2025

Saldo Per 31 Desember 2024	Rp. 3.974.994.523.793
<i>Mutasi Tambah :</i>	-
<i>Mutasi Kurang :</i>	44.466.599.644
Saldo per 31 Desember 2025	Rp. 3.930.527.924.149

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

*Pendapatan PNPB
31 Desember 2025
Rp. 26.604.933.168,-
31 Desember 2024
Rp. 20.646.726.998,-*

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp. 26.604.933.168,- dan Rp. 20.646.726.998,-. Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Pendapatan-LO yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih pendapatan. Akuntansi Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

D.2 Beban Pegawai

*Beban Pegawai
31 Desember 2025
Rp. 11.297.950.265,-
31 Desember 2024
Rp. 5.440.282.399,-*

Jumlah Beban Pegawai pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 11.297.950.265,- dan Rp. 5.440.282.399,-. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara dan Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

D.3 Beban Persediaan

*Beban Persediaan
31 Desember 2025
Rp. 865.869.200,-
31 Desember 2024
Rp. 240.032.000,-*

Jumlah Beban Persediaan pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp. 865.869.200,- dan Rp. 240.032.000,-. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan.

D.4 Beban Barang dan Jasa

*Beban Barang dan Jasa
31 Desember 2025
Rp. 15.506.172.776,-
31 Desember 2024
Rp. 19.021.001.447,-*

Jumlah Beban Barang dan Jasa pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp. 15.506.172.776,- dan Rp. 19.021.001.447,-. Beban Barang dan Jasa adalah konsumsi atas barang atau jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas.

Beban Pemeliharaan
31 Desember 2025
Rp. 7.413.794.676,-
31 Desember 2024
Rp. 5.737.185.534,-

D.5. Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp. 7.413.794.676,- dan Rp. 5.737.185.534,-. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal.

Beban Perjalanan Dinas
31 Desember 2025
Rp. 0,-
31 Desember 2024
Rp. 736.074.220,-

D.6. Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp. 736.074.220,-. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan.

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat
31 Desember 2025
Rp. 0,-
31 Desember 2024
Rp. 0,-

D.7 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan instansi dalam hal meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai akuntansi berbasis akrual yang sudah mulai diterapkan pada tahun 2015.

Beban Bantuan Sosial
31 Desember 2025
Rp. 0,-
31 Desember 2024
Rp. 0,-

D.8 Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-. Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif.

Beban Penyusutan dan Amortisasi
31 Desember 2025
Rp. 38.549.977.952,-
31 Desember 2024
Rp. 39.391.629.565,-

D.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp. 38.549.977.952,- dan Rp. 39.391.629.565,-. Beban Penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud.

Beban Penyisihan

D.10 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

*Piutang Tak
Tertagih
31 Desember 2025
Rp. 591.392,-
31 Desember 2024
Rp. 0,-*

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.591.392,-dan Rp. 0,-

D.11. Beban Lain-lain

*Beban Lain-lain
31 Desember 2025
Rp. 0,-
31 Desember 2024
Rp. 0,-*

Jumlah Beban Lain-lain untuk per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-. Beban Lain-lain merupakan beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap.

D.12 Kegiatan Non Operasional

*Surplus /Defisit
dari Kegiatan Non
Operasional
31 Desember 2025
Rp. 0,-
31 Desember 2024
Rp. 0,-*

Jumlah Kegiatan Non Operasional untuk per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-. Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas.

D.13 Pos Luar Biasa

*Pos Luar Biasa
31 Desember 2025
Rp. 0,-
31 Desember 2024
Rp. 0,-*

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-.

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

E.1 Ekuitas Awal

Ekuitas Awal
31 Desember 2025
Rp.
3.974.994.523.793,
-
31 Desember 2024
Rp.
3.970.525.371.748,
-

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos Ekuitas awal atau ekuitas tahun sebelumnya, Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan dan koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan Perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.

Nilai ekuitas pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp. 3.974.994.523.793,- dan Rp. 3.970.525.371.748,-.

E.2 Surplus/(Defisit) LO

Defisit LO
31 Desember 2025
Rp.
(47.008.770.093,-)
31 Desember 2024
Rp.(49.278.543.175
,-)

Jumlah Surplus/(Defisit) LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp. (47.008.770.093,-) dan Rp.(49.278.543.175,-). Surplus/(Defisit) LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

E.3 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai
Persediaan
31 Desember 2025
Rp. 0,-
31 Desember 2024
Rp. 0,-

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi nilai persediaan pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-.

E.4 Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih Revaluasi
Aset Tetap
31 Desember 2025
Rp. 0,-
31 Desember 2024
Rp. 0,-

Selisih Revaluasi Aset Tetap yang diakibatkan adanya kenaikan nilai aset tetap tersebut di pasaran atau karena rendahnya nilai aset tetap dalam laporan keuangan perusahaan yang disebabkan oleh devaluasi atau sebab lain, sehingga nilai aset tetap dalam laporan keuangan tidak lagi mencerminkan nilai yang wajar. Selisih Revaluasi Aset Tetap pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp 0,-.

E.5 Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi

Koreksi Nilai Aset

Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember

Non Revaluasi
31 Desember 2025
Rp.
(13.407.375.059,-)
31 Desember 2024
Rp.
(12.479.314.692,-)

2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp.(13.407.375.059,-) dan Rp. (12.479.314.692,-).
Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

E.6 Koreksi Lain-lain

Koreksi Lain-lain
31 Desember 2025
Rp. 0,-
31 Desember 2024
Rp. 0,-

Koreksi Lain-lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-.
Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang, dan utang.

E.7 Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar Entitas
31 Desember 2025
Rp.
15.949.545.508,-
31 Desember 2024
Rp.
66.227.009.912,-

Nilai Transaksi Antar Entitas Lain-lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp.15.949.545.508,- dan Rp. 66.227.009.912,-.
Transaksi Antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal K/L, antar K/L, antar BUN, maupun K/L dengan BUN.

Ekuitas Akhir
31 Desember 2025
Rp.
3.930.527.924.149,
-
31 Desember 2024
Rp.
3.974.994.523.793,
-

E.8 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp. 3.930.527.924.149,- dan Rp. 3.974.994.523.793,-.